



Pemkot Hentikan Izin 19 Hotel

Pemprov Siapkan Teropong Canggih Pantau Bangunan

JOGJA - Pemkot Jogja mulai bersikap tegas terhadap izin pendirian hotel baru yang tidak sesuai. Hal itu dibuktikan dengan pemberhentian sementara izin pendirian 19 hotel baru. Pemberhentian terpaksa dilakukan karena ditemukan dokumen yang tidak sesuai.

"Kami sudah kirimkan surat pemberitahuan terkait penghentian sementara izin pembangunan hotel tersebut kepada yang bersangkutan," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja Setiyono kemarin (16/1).

Menurutnya, pemberhentian tersebut tidak dibatasi waktu, dan tergantung kelengkapan dokumen. Jika semua persyaratan sudah diperbaharui dan sesuai, proses pembangunan baru bisa dilanjutkan.

Menurut Setiyono, 19 izin pendirian hotel baru yang dihentikan itu karena berbagai alasan, setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ia mencontohkan, ada hotel yang belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar. Selain itu terdapat pula yang belum melengkapi kajian lingkungan, seperti amdal. "Paling banyak

menyangkut master plan, gambar perencanaan yang diserahkan ke kami, dan kenyataan di lapangan berbeda," tuturnya.

Sekadar diketahui, sejak moratorium pembangunan hotel baru di Kota Jogja dimulai Desember 2013 silam, masuk 104 berkas izin pendirian hotel baru. Dinzin sudah mengeluarkan 77 berkas untuk izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan 44 hotel di antaranya sudah memulai proses pembangunan, dan tujuh hotel lainnya sudah selesai.

Menurutnya, Dinzin sudah secara ketat mengontrol keluarnya izin pendirian hotel baru. Termasuk untuk lokasi-lokasi yang diperbolehkan. Hal itu mengacu pada Perwal 25/2013 tentang penjabaran Rencana Pola Ruang

Terhenti karena Dokumen Tak Sesuai

PENGHENTIAN PEMBANGUNAN:
Surat pemberitahuan penghentian pembangunan hotel sudah dikirim kepada pihak hotel.

Tak sedikit hotel yang pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan. Pemkot Jogja menghentikan izin pembangunan 19 hotel baru.

Pemberhentian tidak dibatasi waktu, tergantung kelengkapan dokumen. Jika semua persyaratan sudah diperbaharui dan sesuai dengan dokumen, proses pembangunan bisa dilanjutkan.

ALASAN TAK SESUAI DOKUMEN:

- Ada hotel yang belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar.
- Ada pula yang belum melengkapi kajian lingkungan seperti amdal.
- Paling banyak menyangkut master plan. Gambar perencanaan yang diserahkan ke Pemkot Jogja dengan kenyataan di lapangan berbeda.

GRAFIS: HERPRI KARTUNRADAR JOGJA

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui

dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang. "Di situ sudah disebutkan wilayah-wilayah yang dilarang berdiri bangunan hotel, jika ada yang mengajukan, dan tidak sesuai, tentu langsung kami tolak," tegasnya.

Teropong Canggih

Pada bagian lain, Pemprov DIJ turut memberikan perhatian serius terhadap pembangunan hotel, mal dan aparteman di Jogjakarta. Sebab dikhawatirkan, keberadaan bangunan-bangunan besar akan merusak tata ruang di DIJ dengan status keistimewaannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIJ Rani Sjamsinansi mengakui pi-

haknya serius menyikapi maraknya bangunan hotel, mal dan aparteman saat ini.

Sebagai langkah awal, pemprov akan menyiapkan alat modern untuk meneropong keberadaan hotel-hotel tersebut. "Ada dua alat, yakni Terrestrial Laser Scanner (TLS) dan Aerial Laser Scanner (ALS)," ujarnya di Kepatihan.

Ia menjelaskan, dengan kedua alat itu, bisa memetakan tata ruang di DIJ lebih jelas. TLS dan ALS bisa meneropong bangunan sampai skala 1 : 1.000. "Hotel-hotel yang salah akan kelihatan," ujarnya.

Keberadaan alat ini, mampu meneropong dengan sangat jelas. Ini sudah mereka lakukan untuk memetakan keraton. Bekerja sama dengan Jurusan Geodesi UGM, proyek uji coba pertama

adalah memotret Pagelaran dan Sitinggil, Keraton. "Dari teropong itu, tiang-tiang yang mulai miring di keraton terlihat," terang Rani.

Kedua alat tersebut, sambung Rani, bisa menjadi solusi pemetaan selama ini. Sebab, selama ini tata ruang dinas PUP-ESDM bergantung terhadap pemetaan dari satelit. "Dan itu hasilnya tak akurat. Setiap pemotretan melalui satelit, harus mengecek berulang-ulang kondisi riilnya," jelasnya.

Terpisah, Ketua Jurusan Teknik Geodesi UGM Djurdjani mengatakan, hasil pemetaan TLS dan ALS berupa gambar tiga dimensi (3D) maupun dua dimensi (2D). "Itu bisa diguna-

kan untuk arsip, maupun acuan pembuatan *site-plan* penataan kawasan," ujarnya.

Bahkan ke depan, untuk 13 kawasan cagar budaya (KCB) yang telah ditetapkan Gubernur Hamengku Buwono X, akan memanfaatkan kedua alat tersebut. Ini agar hasil pemetaan bangunan di KCB seperti Maliboro, Keraton, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, dan yang lain, bisa benar-benar detail. "Pemetaan lebih lanjut nanti menunggu prioritas, mau mana dulu," tambahnya.

Tahun ini, dorongan Pemprov DIJ mengambil alih penataan tata ruang di DIJ memang gencar dilakukan. Ini mengingat DIJ me-

miliki status keistimewaan yang berbeda dengan daerah lain. Status itu memberikan kewenangan bagi pemprov untuk menata ruang.

"Pilar keistimewaan DIJ salah satunya tata ruang. Ini harus ditekankan menjadi filosofi pembangunan di DIJ," saran anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudayana.

Huda menegaskan, Raperdais Tata Ruang memberikan kelebihan tersebut. Ini harus dimanfaatkan dengan baik, demi kesejahteraan warga DIJ. "Bukan investor dari luar DIJ yang mengacau tata ruang yang berdampak sosial dan ekonomi bagi warga DIJ," sentilnya. (eri/pra/jko/ga)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005